



## Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi

Julyana Dwirahayu, Rachmat Ramdani, Gun Gun Gumilar

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 2 November 2025  
Revised: 14 November 2025  
Accepted: 29 November 2025

### Abstract

*Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dan juga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur peran kepala desa masih kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan ini, sehingga pembangunan infrastruktur ini tidak merata di masyarakat hanya sebagian masyarakat saja yang bisa merasakannya. Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu terkendalanya anggaran dan penyempitan lahan dalam pemberdayaan pertanian, sehingga pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Baru belum maksimal. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Hendaknya pada kegiatan pemberdayaan dapat diketahui oleh berbagai pihak di desa Tanjung Baru secara menyeluruh, baik dari petani, pemerintah desa bahkan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan dapat membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menilai sehingga dapat mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut setelah dilakukan. Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa.*

**Kata Kunci:** Peran, Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan

(\*) Corresponding Author: [julyanadwirahayu72@gmail.com](mailto:julyanadwirahayu72@gmail.com)

**How to Cite:** Dwirahayu, J., Ramdani, R., & Gumilar, G. (2025). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 406-417. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13496>.

## PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014,

<sup>1</sup>daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau juga sering di artikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal - usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Florentinus Belareq. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol 5. No 2. 2017: 701-710.

itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran

Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Putra Wahyudi, Iman Surya, Rita Kala Linggi. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol 7. No 1. 2019: 371-382

Desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa dari 8 Desa di Wilayah Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Karena berdasarkan apa yang dilihat dari Desa Tanjung Baru dalam mengelola ekonominya masih sangat rendah, karena sumber daya manusia yang rendah, Pendidikan, dan rendahnya perekonomian masyarakat. Dan dalam hal ini upaya untuk menanggulangnya harus mempunyai konsep pemberdayaan yang tepat dan harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Pemerintah Desa Tanjung Baru juga dalam meningkatkan aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Tanjung Baru adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Tanjung Baru Kepala Desa Tanjung Baru dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi”**.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pengertian Peran**

**Suharto (2006:32)**, mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support).<sup>3</sup> Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut

---

<sup>3</sup> Wilda Sari. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.

memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. .

Menurut **Soekanto (2009)** arti peran ini ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda. <sup>4</sup>

Dapat disimpulkan Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang agar dapat mempengaruhi suatu keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi yang dimilikinya dan seorang dikatakan menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.

#### **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

**Sumardjo (2019)** Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan individu/ masyarakat sehingga menguat kapasitasnya, untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran/ pendidikan dan usaha-usaha lain (misalnya membantu penyediaan fasilitas tertentu), yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka bertindak mengatasi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

**Rahman Mulyawan (2012)** Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat,

---

<sup>4</sup> Wilda Sari. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.

<sup>5</sup> Ibid  
organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat hakekatnya memenuhi

kesejahteraan bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan serta masyarakat bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

### **Pengertian Pembangunan**

Menurut **Soetomo**, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.<sup>6</sup> Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atautah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.

**Rogers (2012)**, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan<sup>7</sup>. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

---

<sup>6</sup> Wilda Sari. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.

<sup>7</sup> Ibid

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Sehingga kita dapat mengetahui apakah peran kepala desa ini berjalan efektif atau tidak. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Baru
2. Warga masyarakat 2 orang

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan

menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37). Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, dokumen- dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal pembangunan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88). Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data). Data yang ditelah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami, dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

## **PEMBAHASAN**

Suatu desa dikatakan mandiri apabila desa mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, desa mandiri bertumpu pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti desa dapat dicapai maka desa itu disebut sebagai desa berdikari. Karsa, karya, sembada desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa. Pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di desa.

Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikarang Timur, desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 14.672 jiwa dengan luas wilayah 736,278 HA dan Desa Tanjung Baru ini berbatasan dengan berbagai desa, dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangsambung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojongsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipayung,

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatibaru. Dan sebagian penduduk Desa Tanjung Baru memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani, buruh pabrik, dan pedagang. Desa Tanjung Baru memiliki sumber daya alam yang potensial, hal ini karena letak geografis Desa Tanjung Baru dikelilingi persawahan, kebun yang masih luas, dan aliran sungai irigasi.

### **Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi**

Dalam pemberdayaan masyarakat maka peran kepala desa adalah pemimpin yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yaitu khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan peran kepala desa lainnya yang mengarah kepada pembarantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Hal ini juga yang diharapkan oleh masyarakat kepada kepala desa beserta seluruh bawahan atau pegawai yang ada dilingkungan Desa Tanjung Baru untuk memberikan pemberdayaan yang maksimal kepada masyarakat. Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yaitu melakukan kehidupan demokrasi, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, memberdayakan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi SDA, dan mengembangkan pendapatan masyarakat. Adapun peran kepala desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pangan adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan, tanaman dan lain- lain.
2. Swakarya memberikan potensi kepada warganya agar memiliki keterampilan, meliputi pembuatan prasasti, ukiran, dan pembuatan sablon.
3. Swakelola yaitu memberikan bantuan usaha melalui bumdes seperti temu karya, padat karya tunai yang dimana masyarakat diberikan modal untuk usaha oleh desa.
4. Rutilahu (rumah tidak layak huni) dimana program ini dibentuk oleh desa untuk membantu masyarakat desa setempat merenovasi rumah mereka yang termasuk kategori tidak layak huni seperti atap rumah yang tidak layak, lantai yang masih beralaskan tanah, dinding rumah yang masih memakai bilik. Didalam program Rutilahu ini sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan target setiap tahunnya yaitu dengan merenovasi 20 unit rumah yang termasuk kategori tidak layak huni.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut, terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala seperti terkendalanya anggaran APBD Kabupaten dan Provinsi. Serta penghambat berkembangnya pemberdayaan di desa yaitu penyempitan lahan pertanian dan pemasaran hasil pertanian sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan perkebunan kurang maksimal. Harapannya pemerintah desa dapat memperhatikan kembali terutama infrastruktur akses jalan desa agar dapat menjangkau dan masyarakat bisa menjual hasil dari perkebunan dan pertanian mereka.

Dengan adanya kendala tersebut, peran kepala desa Tanjung Baru yaitu seharusnya meningkatkan kinerjanya dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih optimal lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Karena peran kepala desa sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat terealisasi dengan baik, karena pada kenyataan masih banyak masyarakat yang belum merasakan pemberdayaan yang ada di desa atau secara tidak langsung pemberdayaan tersebut belum merata.

Berarti dapat dikatakan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat belum maksimal di karenakan pelaksanaan pemberdayaan yang masih belum merata sehingga peran kepala desa harus lebih di tingkatkan lagi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan masyarakat dapat merasakan pemberdayaan tersebut secara merata.

### **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi**

Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur- struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam infastruktur ini terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Jaling (jalan lingkungan).
2. Lining (lingkungan hidup).
3. Swakarya (gotong royong).

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu terkendalanya anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga adanya partisipasi masyarakat, dan dukungan masyarakat yang mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan seperti dalam hal gotong royong dan lain-lain.

Dengan adanya kendala tersebut, peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini, akan tetapi peran kepala desa

Tanjung Baru belum efektif dikarenakan masih tahapan teknis dan mekanismenya melalui aturan. Kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, oleh karena itu kebijakan kepala desa dalam suatu perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga peran kepala desa harus benar-benar optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Akan tetapi dari sudut pandang masyarakat peran kepala desa di Tanjung Baru belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pembangunan infrastruktur seperti jaling (jalan lingkungan) belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga masyarakat merasa pembangunan infrastruktur di desa belum merata hanya sebagian masyarakat saja yang sudah merasakan hasilnya.

Dan dengan hal ini dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur peran kepala desa masih kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan ini, sehingga pembangunan infrastruktur ini tidak merata di masyarakat hanya sebagian masyarakat saja yang bisa merasakannya.

### **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Baru Menurut Teori Suharto**

Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan teori menurut Suharto maka Peran Kepala Desa Tanjung Baru dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu sebagai berikut:

#### **1. Peran Sebagai Kebijakan**

Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur terdapat kebijakan di dalamnya yang ditetapkan oleh kepala desa untuk memajukan desa tersebut. Dan kepala desa sebagai pemegang kendali dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di wilayah desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, oleh karena itu kebijakan kepala desa dalam suatu perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga peran kepala desa harus benar-benar optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Di Desa Tanjung Baru peran kepala dalam membuat kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yaitu dengan membuat beberapa program untuk pemberdayaan dan pembangunan, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan tersebut peran kepala desa dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari pemerintah tingkat atas. Maka untuk menjalankan program tersebut dengan baik kepala desa harus mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya.

#### **2. Peran Sebagai Strategi**

Peran yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Di Desa Tanjung Baru peran kepala desa dalam membuat strategi untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yaitu dengan membuat program pemberdayaan masyarakat Swasembada, Swakarya, Swakelola, dan Rutilahu. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Jaling (jalan lingkungan), Lining (lingkungan hidup), dan Swakarya (gotong royong).

### 3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari masyarakat. Di Desa Tanjung Baru peran kepala desa sebagai alat komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga adanya partisipasi masyarakat, dan dukungan masyarakat yang mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan seperti dalam hal gotong royong dan lain-lain.

## **PENUTUP**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yaitu Faktor penghambatnya yaitu terkendala anggaran, sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya aturan (regulasi) yang telah ditetapkan dan juga adanya partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong untuk pelaksanaan pembangunan. Dan juga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur peran kepala desa masih kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan ini, sehingga pembangunan infrastruktur ini tidak merata di masyarakat hanya sebagian masyarakat saja yang bisa merasakannya.

Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif,

menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu terkendalanya anggaran dan penyempitan lahan dalam pemberdayaan pertanian, sehingga pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Baru belum maksimal. Dan peran kepala desa Tanjung Baru belum maksimal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga seharusnya meningkatkan kinerjanya dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih optimal lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti akan memaparkan beberapa saran, diantaranya adalah, Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Tanjung Baru semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Hendaknya pada kegiatan pemberdayaan dapat diketahui oleh berbagai pihak di desa Tanjung Baru secara menyeluruh, baik dari petani, pemerintah desa bahkan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan dapat membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menilai sehingga dapat mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut setelah dilakukan. Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Tanjung Baru, diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Perlu di lakukan pembinaan dan pelatihan serta pendampingan yang di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada aparat desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa terutama dalam hal teknis di lapangan agar pelaksanaan pembangunan desa membangun dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang di harapkan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Florentinus Belareq. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol 5. No 2. 2017: 701-710.
- Putra Wahyudi, Iman Surya, Rita Kala Linggi. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.  
*Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol 7. No 1. 2019: 371-382

**Skripsi**

Wilda Sari. 2020. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar.